

ANALISIS MODEL *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENGLOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAERAH

Octaviani Suryaningsih Masaguni¹, Rukiah Nggilu²,
Novita Rolinsa Madina³, Masran Biahimo⁴

Universitas Bina Taruna Gorontalo

octavianimasaguni93@gmail.com¹, nggilurukiah23365@gmail.com²,
novitamadina6@gmail.com², masranbiahimo123@gmail.com⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model *collaborative governance* dalam pengelolaan sumber daya alam daerah, dengan menyoroti mekanisme kolaborasi, peran aktor-aktor yang terlibat, serta faktor-faktor keberhasilan dan kendala yang dihadapi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan triangulasi sumber dan metode untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model *collaborative governance* diterapkan melalui forum koordinasi lintas sektor dengan mekanisme komunikasi terbuka dan pengambilan keputusan deliberatif. Keberhasilan implementasi didukung oleh komitmen kepemimpinan kolaboratif, regulasi adaptif, kapasitas kelembagaan memadai, dan komunikasi berbasis kepercayaan, namun menghadapi hambatan berupa ego sektoral, tumpang tindih kewenangan, dan keterbatasan sumber daya. Model ini berimplikasi positif terhadap efektivitas pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan melalui penguatan kelembagaan inklusif, peningkatan partisipasi masyarakat, dan kebijakan berbasis konsensus yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Keywords: *Collaborative Governance, Kepemimpinan Kolaboratif, Pengelolaan Sumber Daya Alam, Pembangunan Berkelanjutan, Tata Kelola Partisipatif*

ABSTRACT

This research aims to analyze the collaborative governance model in regional natural resource management, highlighting collaboration mechanisms, the roles of involved actors, and the success factors and constraints encountered. The research method uses a descriptive-analytical qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, participatory observation, and documentation studies. Data analysis uses the interactive model of Miles and Huberman with triangulation of sources and methods to ensure data validity. The research results show that the collaborative governance model is implemented through cross-sectoral coordination forums with open communication mechanisms and deliberative decision-making. Successful implementation is supported by collaborative leadership commitment, adaptive regulations, adequate institutional capacity, and trust-based communication, but faces obstacles in the form of sectoral ego, overlapping authorities, and limited resources. This model has positive implications for the effectiveness of sustainable natural resource management through strengthening inclusive institutions, increasing community participation, and consensus-based policies that balance economic, social, and environmental interests.

Keywords: *Collaborative Governance, Collaborative Leadership, Natural Resource Management, Sustainable Development, Participatory Governance*

PENDAHULUAN

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) merupakan isu strategis dalam pembangunan daerah yang menuntut keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sumber daya alam yang melimpah tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat apabila pengelolaannya tidak diiringi dengan tata kelola yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan (Erina & Yanis, 2020). Di banyak daerah di Indonesia, konflik kepentingan antara pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta sering muncul akibat perbedaan orientasi dalam pemanfaatan SDA (Amar dkk., 2020). Kondisi ini menegaskan perlunya model tata kelola yang mampu mengintegrasikan berbagai kepentingan secara harmonis melalui pendekatan kolaboratif (Murtasidin & Sujadmi, 2021).

Model *collaborative governance* hadir sebagai pendekatan yang relevan dalam menjawab kompleksitas pengelolaan SDA di tingkat daerah (Aswin dkk., 2022). Konsep ini menekankan pada proses pengambilan keputusan bersama antara pemerintah, masyarakat sipil, dunia usaha, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam suatu forum Bersama (Bradley dkk., 2022). Dengan demikian, kebijakan dan implementasi pengelolaan SDA tidak lagi bersifat top-down, tetapi lebih partisipatif dan deliberatif. Pendekatan kolaboratif ini diyakini dapat mengurangi konflik, meningkatkan legitimasi kebijakan, serta memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap sumber daya yang dikelola (Wiharja dkk., 2024a).

Namun demikian, penerapan *collaborative governance* di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam aspek koordinasi antarlembaga, kesenjangan kapasitas antaraktor, serta perbedaan kepentingan politik dan ekonomi (Agung Arishandy & Sukmana, 2023a). Banyak inisiatif kolaboratif yang berhenti di tingkat formalitas tanpa menghasilkan perubahan substantif terhadap praktik pengelolaan SDA (Pangaliyev dkk., 2024). Padahal, keberhasilan kolaborasi ditentukan oleh adanya kepercayaan (*trust building*), komitmen jangka panjang, serta mekanisme komunikasi yang terbuka antara seluruh pihak (Bhattarai dkk., 2020). Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap model kolaborasi yang telah diterapkan di daerah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat efektivitasnya.

Selain itu, otonomi daerah memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan model tata kelola SDA yang sesuai dengan karakteristik lokal dan kebutuhan masyarakat setempat (Sobri, 2017). Dalam konteks ini, *collaborative governance* menjadi instrumen strategis dalam memperkuat kapasitas kelembagaan

daerah, terutama dalam pengambilan keputusan yang inklusif dan adaptif terhadap dinamika lingkungan (Zia Ud Din dkk., 2023). Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa kolaborasi yang efektif dapat mendorong pengelolaan SDA yang lebih berkelanjutan, baik dari sisi ekonomi maupun ekologi (Ramdani & Mustalahti, 2023). Hal ini selaras dengan semangat pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai salah satu pilar utama.

Penelitian mengenai model *collaborative governance* juga penting untuk mengidentifikasi sejauh mana peran aktor non-pemerintah, seperti lembaga swadaya masyarakat, komunitas adat, dan sektor swasta, dalam mendukung proses pengelolaan SDA di daerah. Keterlibatan mereka sering kali menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan, terutama ketika pemerintah daerah menghadapi keterbatasan sumber daya dan kapasitas teknis. Dengan memahami pola interaksi antaraktor tersebut, diharapkan dapat ditemukan model kolaborasi yang lebih kontekstual, adaptif, dan berkelanjutan untuk diterapkan di berbagai daerah di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model *collaborative governance* dalam pengelolaan sumber daya alam daerah, dengan menyoroti mekanisme kolaborasi, peran aktor-aktor yang terlibat, serta faktor-faktor keberhasilan dan kendala yang dihadapi. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian administrasi publik, sekaligus rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan SDA yang lebih partisipatif dan berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis (Simarmata dkk., 2024) dengan tujuan memahami secara mendalam model *collaborative governance* dalam pengelolaan sumber daya alam di tingkat daerah. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, interaksi, dan dinamika kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil (Muallim dkk., 2024). Lokasi penelitian ditentukan secara purposive, yaitu pada daerah yang memiliki karakteristik pengelolaan sumber daya alam strategis dan telah menerapkan atau mengembangkan praktik kolaboratif. Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif, serta data sekunder dari dokumen kebijakan, laporan resmi, dan hasil penelitian terdahulu. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang saling melengkapi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data,

penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk menemukan pola hubungan dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kolaborasi (Permatasari & Walinegoro, 2023). Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode serta *member check* agar hasil penelitian valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk Dan Mekanisme Model *Collaborative Governance* Yang Diterapkan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Tingkat Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk model *collaborative governance* yang diterapkan dalam pengelolaan sumber daya alam di tingkat daerah umumnya berlandaskan pada prinsip kemitraan antara pemerintah daerah, masyarakat lokal, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah. Kolaborasi ini terbentuk karena adanya kesadaran bersama bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, melainkan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan (Juk dkk., 2024). Dalam praktiknya, model kolaboratif ini berbentuk forum koordinasi lintas sektor atau lembaga, tim terpadu pengelolaan sumber daya alam, dan kemitraan formal melalui nota kesepahaman (*memorandum of understanding*) antara pihak-pihak yang berkepentingan (Van Vu dkk., 2025). Bentuk kolaborasi tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi kebijakan, mencegah tumpang tindih kewenangan, serta menciptakan rasa memiliki bersama terhadap sumber daya yang dikelola.

Dari sisi mekanisme pelaksanaan kolaborasi, penelitian menemukan bahwa proses *collaborative governance* berjalan melalui beberapa tahapan utama, yaitu: inisiasi kolaborasi, pembentukan forum komunikasi, perumusan kebijakan bersama, pelaksanaan kegiatan lapangan, dan evaluasi bersama. Pada tahap inisiasi, kolaborasi biasanya dimulai oleh pemerintah daerah melalui identifikasi permasalahan dan potensi SDA (Permatasari & Walinegoro, 2023). Tahap berikutnya adalah pembentukan forum koordinasi yang menjadi wadah diskusi antaraktor (Akbar dkk., 2022). Proses perumusan kebijakan dilakukan secara partisipatif, di mana setiap pihak memberikan masukan sesuai bidang kompetensinya (Wiharja dkk., 2024b). Dalam pelaksanaan kegiatan, peran dan tanggung jawab didistribusikan secara proporsional berdasarkan kapasitas masing-masing aktor, sementara tahap evaluasi dilakukan secara periodik untuk menilai efektivitas dan dampak kebijakan kolaboratif terhadap lingkungan serta kesejahteraan Masyarakat (Aswin dkk., 2022).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mekanisme komunikasi dan pengambilan keputusan menjadi kunci keberhasilan model *collaborative governance*. Komunikasi yang terbuka, transparan, dan berbasis kepercayaan (*trust building*) mendorong partisipasi aktif seluruh pihak (Pramodia Ahsan dkk., 2022). Proses pengambilan keputusan dilakukan secara deliberatif, yaitu melalui musyawarah dan

kesepakatan bersama, bukan dominasi satu pihak (Ansell & Gash, 2008). Dalam forum tersebut, pemerintah berperan sebagai fasilitator, bukan pengendali tunggal, sementara masyarakat dan sektor swasta berperan sebagai mitra strategis yang turut memberikan inovasi, informasi lokal, serta sumber daya teknis dan finansial (Rădulescu dkk., 2023). Mekanisme semacam ini menciptakan keseimbangan kekuasaan antaraktor sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan diterima luas oleh masyarakat.

Namun, dalam penerapannya, penelitian menemukan bahwa efektivitas mekanisme kolaboratif masih menghadapi sejumlah kendala. Hambatan yang muncul antara lain rendahnya kapasitas kelembagaan, perbedaan kepentingan antaraktor, serta lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah. Selain itu, mekanisme kolaborasi belum sepenuhnya didukung oleh regulasi yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga forum-forum kolaboratif sering kali bersifat temporer dan bergantung pada inisiatif pimpinan daerah. Meski demikian, daerah-daerah yang memiliki budaya partisipatif kuat dan kepemimpinan kolaboratif menunjukkan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi, terutama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan pemerataan manfaat ekonomi dari pengelolaan SDA.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menegaskan bahwa model *collaborative governance* dalam pengelolaan sumber daya alam daerah merupakan pendekatan yang efektif untuk mengintegrasikan kepentingan berbagai pihak, asalkan didukung oleh mekanisme komunikasi yang terbuka, komitmen bersama, serta regulasi yang mendukung kesinambungan kolaborasi. Mekanisme yang berjalan baik mampu menciptakan keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi sumber daya alam, memperkuat legitimasi kebijakan publik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan kolaboratif dan pelembagaan mekanisme komunikasi menjadi prasyarat utama bagi keberhasilan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di tingkat daerah.

Faktor-Faktor Yang Menjadi Pendukung Dan Penghambat Keberhasilan Implementasi *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Daerah

Faktor pendukung utama keberhasilan implementasi *collaborative governance* dalam pengelolaan sumber daya alam daerah terletak pada adanya komitmen bersama dan kepemimpinan kolaboratif dari pemerintah daerah (Ansell & Gash, 2008). Pemerintah yang memiliki visi partisipatif dan terbuka terhadap keterlibatan masyarakat mampu menciptakan iklim kepercayaan dan kerja sama lintas sektor (Juk dkk., 2024). Kepemimpinan kolaboratif ini berfungsi sebagai penggerak utama dalam mengintegrasikan peran antaraktor dan menjaga konsistensi arah kebijakan (Agung Arishandy & Sukmana, 2023b). Selain itu, dukungan regulasi daerah yang jelas dan adaptif terhadap dinamika sosial-ekologis menjadi faktor penting dalam menjaga

keberlanjutan kolaborasi. Regulasi yang berpihak pada transparansi, akuntabilitas, dan pelibatan publik terbukti mampu memperkuat legitimasi model *collaborative governance* di tingkat lokal.

Selain faktor kepemimpinan dan regulasi, kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi unsur pendukung yang signifikan. Daerah yang memiliki aparatur dan institusi dengan kapasitas manajerial, teknis, dan sosial yang memadai lebih siap untuk mengelola hubungan antaraktor secara efektif (Saptana dkk., 2023). Lembaga yang adaptif dan responsif terhadap perubahan kebijakan mampu memfasilitasi koordinasi lintas sektor dengan baik (Mursalin Mursalin & Nurasia Natsir, 2024). Di sisi lain, keberadaan aktor masyarakat sipil yang aktif dan kritis turut memperkuat kolaborasi, karena dapat mendorong transparansi serta mengawasi jalannya pengelolaan sumber daya alam agar tidak didominasi oleh kepentingan tertentu (Wilson dkk., 2021). Kehadiran lembaga adat, kelompok masyarakat lokal, dan organisasi non-pemerintah yang memiliki pengetahuan lokal juga menjadi modal sosial penting dalam mewujudkan tata kelola yang inklusif (Meilasari-Sugiana, 2012).

Penelitian juga menemukan bahwa faktor komunikasi dan kepercayaan antaraktor (*trust building*) berperan krusial dalam menjaga keberlanjutan kolaborasi. Kolaborasi yang sukses selalu didukung oleh mekanisme komunikasi yang terbuka, saling menghargai, dan berbasis pada dialog dua arah (Lis dkk., 2023). Kepercayaan yang terbentuk melalui interaksi berulang menciptakan rasa tanggung jawab bersama terhadap hasil kebijakan (Suyeno dkk., 2024). Ketika komunikasi terjalin dengan baik, potensi konflik kepentingan dapat diminimalisasi, dan seluruh pihak cenderung bersedia berbagi informasi maupun sumber daya. Forum komunikasi yang rutin dan transparan terbukti mampu memperkuat solidaritas antaraktor serta meningkatkan kualitas keputusan bersama dalam pengelolaan sumber daya alam (Kyllönen dkk., 2006).

Di sisi lain, penelitian mengidentifikasi sejumlah faktor penghambat yang sering menghambat efektivitas implementasi *collaborative governance*. Hambatan utama muncul dari ego sektoral dan tumpang tindih kewenangan antarinstansi pemerintah, yang menyebabkan proses koordinasi berjalan lambat dan tidak efisien (Muntalima dkk., 2023). Selain itu, keterbatasan sumber daya keuangan dan teknis, serta rendahnya kapasitas SDM di beberapa daerah, menjadi kendala dalam menjaga kesinambungan kolaborasi (Suyeno dkk., 2024). Faktor politik lokal, seperti perubahan kepemimpinan daerah atau kepentingan kelompok tertentu, juga dapat mengganggu stabilitas forum kolaboratif yang telah terbentuk (Pramestya & Wibawani, 2021). Ketidaksinambungan program dan lemahnya komitmen antaraktor sering kali membuat proses kolaborasi berhenti di tingkat formalitas tanpa menghasilkan dampak nyata.

Secara keseluruhan, hasil penelitian dan pembahasan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi *collaborative governance* dalam pengelolaan sumber

daya alam sangat bergantung pada kombinasi faktor struktural, kultural, dan institusional. Komitmen politik, regulasi yang mendukung, kapasitas kelembagaan, serta komunikasi yang terbuka menjadi pilar utama dalam memperkuat kolaborasi. Sebaliknya, lemahnya koordinasi, ego sektoral, dan keterbatasan sumber daya menjadi penghambat utama yang perlu diatasi melalui penguatan tata kelola dan mekanisme partisipatif. Oleh karena itu, keberlanjutan model *collaborative governance* memerlukan dukungan kebijakan yang konsisten, penguatan kapasitas aktor, serta upaya membangun budaya kolaboratif yang berorientasi pada keadilan dan keberlanjutan sumber daya alam daerah.

Implikasi Penerapan Model *Collaborative Governance* Terhadap Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan Di Daerah

Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah mendorong terciptanya tata kelola yang lebih partisipatif dan akuntabel. Melalui mekanisme kolaboratif, kebijakan pengelolaan SDA tidak lagi bersifat top-down, melainkan disusun berdasarkan kebutuhan dan aspirasi Bersama (Juk dkk., 2024). Proses ini meningkatkan legitimasi kebijakan di mata masyarakat serta memperkuat rasa tanggung jawab kolektif terhadap pelestarian sumber daya alam. Selain itu, keterlibatan berbagai pihak memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan dan teknologi yang berkontribusi pada peningkatan efisiensi serta keberlanjutan program pengelolaan lingkungan (Salsabila dkk., 2023).

Dari aspek kelembagaan, penelitian menemukan bahwa penerapan *collaborative governance* mampu meningkatkan kapasitas institusi lokal dalam merespons permasalahan SDA yang kompleks. Adanya forum koordinasi lintas sektor mempercepat pengambilan keputusan, mengurangi tumpang tindih kewenangan, serta memperbaiki koordinasi antarinstansi (Van Vu dkk., 2025). Pemerintah daerah yang mengadopsi model kolaboratif cenderung lebih adaptif dalam mengelola isu lingkungan, karena keputusan yang diambil mencerminkan hasil dialog dan kesepakatan bersama antaraktor (Cristofoli dkk., 2023). Hal ini berdampak langsung terhadap efektivitas pelaksanaan program konservasi, rehabilitasi lahan, dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Kolaborasi juga memungkinkan penyaluran sumber daya—baik dana, tenaga, maupun keahlian—secara lebih efisien karena setiap pihak berperan sesuai kapasitas dan keahliannya masing-masing.

Dari sisi sosial, penerapan *collaborative governance* memberikan implikasi terhadap peningkatan partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dengan dilibatkannya masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pengelolaan SDA, masyarakat merasa memiliki peran strategis dalam menjaga kelestarian lingkungan. Rasa kepemilikan ini memperkuat komitmen kolektif untuk menjaga ekosistem dan mengurangi praktik-praktik eksploitasi berlebihan

(Salsabila dkk., 2023). Selain itu, meningkatnya transparansi dalam pengambilan keputusan membantu memperkecil potensi konflik horizontal antaraktor, khususnya antara masyarakat adat, pelaku industri, dan pemerintah daerah. Dengan demikian, kolaborasi berperan tidak hanya dalam efisiensi pengelolaan, tetapi juga dalam memperkuat kohesi sosial dan stabilitas lokal.

Namun demikian, penelitian juga menemukan bahwa implikasi positif tersebut belum merata di semua daerah, karena keberhasilan penerapan *collaborative governance* sangat bergantung pada kualitas komunikasi, komitmen politik, dan konsistensi kebijakan. Di daerah yang memiliki kelembagaan kuat dan kepemimpinan kolaboratif, efektivitas pengelolaan SDA meningkat secara signifikan (Bhattarai dkk., 2020). Sebaliknya, di daerah dengan ego sektoral tinggi atau partisipasi masyarakat rendah, kolaborasi sering kali bersifat seremonial dan tidak menghasilkan perubahan substantif terhadap praktik pengelolaan SDA (Ganeshu dkk., 2024). Faktor keberlanjutan kolaborasi juga masih menjadi tantangan, terutama ketika terjadi perubahan kepemimpinan politik atau pergeseran kepentingan ekonomi yang dapat melemahkan forum kerja sama yang telah terbentuk (Rye & Isaksson, 2018).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa model *collaborative governance* berimplikasi langsung terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan SDA yang berkelanjutan melalui tiga dimensi utama: kelembagaan yang inklusif, partisipasi masyarakat yang meningkat, dan kebijakan yang berbasis konsensus. Kolaborasi yang berjalan baik mampu mengintegrasikan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam satu kerangka tata kelola yang seimbang. Dengan demikian, penerapan model ini tidak hanya memperkuat efektivitas kebijakan pengelolaan SDA, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa model *collaborative governance* dalam pengelolaan sumber daya alam daerah merupakan pendekatan efektif yang mampu mengintegrasikan kepentingan pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah melalui mekanisme partisipatif dan deliberatif. Keberhasilan implementasi model ini sangat ditentukan oleh faktor-faktor pendukung seperti komitmen kepemimpinan kolaboratif, regulasi yang adaptif, kapasitas kelembagaan yang memadai, serta komunikasi terbuka berbasis kepercayaan (*trust building*) antaraktor. Namun, efektivitasnya masih menghadapi hambatan berupa ego sektoral, tumpang tindih kewenangan, keterbatasan sumber daya, dan inkonsistensi kebijakan akibat dinamika politik lokal. Penerapan model *collaborative governance* memberikan implikasi positif terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan SDA berkelanjutan melalui tiga dimensi utama: penguatan kelembagaan yang inklusif, peningkatan

partisipasi dan kepercayaan masyarakat, serta kebijakan berbasis konsensus yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, keberlanjutan model ini memerlukan penguatan tata kelola melalui regulasi yang konsisten, peningkatan kapasitas aktor, serta pelembagaan budaya kolaboratif yang berorientasi pada keadilan dan keberlanjutan sumber daya alam daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Arishandy, B., & Sukmana, H. (2023a). Collaborative Governance in the Permitted Literacy Village Program, Jabon District, Sidoarjo Regency. *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 3(2), 254–259. <https://doi.org/10.35877/454RI.daengku1545>
- Agung Arishandy, B., & Sukmana, H. (2023b). Collaborative Governance in the Permitted Literacy Village Program, Jabon District, Sidoarjo Regency. *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 3(2), 254–259. <https://doi.org/10.35877/454RI.daengku1545>
- Akbar, R., Supriyono, B., & Domai, T. (2022). Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Gubugklakah Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 8(2), 170–177. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2022.008.02.5>
- Amar, S., Alianis, Ariusni, & Satrianto, A. (2020). Indonesian Sustainable Economic Development in The Institutional Perspective. *Proceedings of the 4th Padang International Conference on Education, Economics, Business and Accounting (PICEEBA-2 2019)*. 4th Padang International Conference on Education, Economics, Business and Accounting (PICEEBA-2 2019), Padang, Indonesia. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200305.085>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Aswin, A., Ariesmansyah, A., & Indrianie, M. (2022). Collaborative Governance Model in the Development Center of Economic Empowerment and Community Creativity in Bandung City. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 1(5), 1189–1208. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v1i5.1071>
- Bhattarai, K. K., Pant, L. P., & FitzGibbon, J. (2020). Contested governance of drinking water provisioning services in Nepal's transboundary river basins. *Ecosystem Services*, 45, 101184. <https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2020.101184>
- Bradley, S., Mahmoud, I. H., & Arlati, A. (2022). Integrated Collaborative Governance Approaches towards Urban Transformation: Experiences from the CLEVER Cities Project. *Sustainability*, 14(23), 15566. <https://doi.org/10.3390/su142315566>

- Cristofoli, D., Trivellato, B., Micacchi, M., & Valotti, G. (2023). Finally Throwing Those Wellies Away? Collaborating in Search of a Solution for Venice Flooding. *Environmental Management*, 71(3), 587–600. <https://doi.org/10.1007/s00267-022-01727-3>
- Erina, P., & Yanis, A. M. (2020). Reconstruction of Mining Policies on Justice in Lampung Province. *BESTUUR*, 8(2), 139. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v8i2.42830>
- Ganeshu, P., Fernando, T., Therrien, M.-C., & Keraminiyage, K. (2024). Inter-Organisational Collaboration Structures and Features to Facilitate Stakeholder Collaboration. *Administrative Sciences*, 14(2), 25. <https://doi.org/10.3390/admsci14020025>
- Juk, B., Shaw, F. R., Alaydrus, A., & Hastira, Muh. F. (2024). Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Tentang Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. *ijd-demos*, 6(3). <https://doi.org/10.37950/ijd.v6i3.499>
- Kyllönen, S., Colpaert, A., Heikkinen, H., Jokinen, M., Kumpula, J., Marttunen, M., Muje, K., & Raitio, K. (2006). Conflict management as a means to the sustainable use of natural resources. *Silva Fennica*, 40(4). <https://doi.org/10.14214/sf.323>
- Lis, A. M., Rozkwitalska, M., & Lis, A. (2023). Sustainability objectives and collaboration lifecycle in cluster organizations. *Quality & Quantity*, 57(5), 4049–4068. <https://doi.org/10.1007/s11135-022-01526-2>
- Meilasari-Sugiana, A. (2012). Collective action and ecological sensibility for sustainable mangrove governance in Indonesia: Challenges and opportunities. *Journal of Political Ecology*, 19(1). <https://doi.org/10.2458/v19i1.21726>
- Muallim, A. H., Juharni, J., & Suaib, Muh. R. (2024). Colaborative Governance Pengembangan Pariwisata dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah: Studi Kasus: Perda Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Pariwisata Kabupaten Sinjai. *Paradigma Journal of Administration*, 2(2), 83–88. <https://doi.org/10.35965/pja.v2i2.5159>
- Muntalima, N. C., Silumbwe, A., Zulu, J. M., Mweemba, C., & Hangoma, P. (2023). *Collaborative governance of an integrated system for collecting contributions for social health insurance, pension, and taxes from the informal sector: A synthesis of stakeholder perspectives*. In Review. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-3697112/v1>
- Mursalin Mursalin & Nurasia Natsir. (2024). Koordinasi Lintas Sektor dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Tallo di Makassar. *Student Scientific Creativity Journal*, 2(5), 172–181. <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v2i5.4067>

- Murtasidin, B., & Sujadmi, S. (2021). Collaborative approach for coastal and marine spatial planning in Bangka Belitung Island Province. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 926(1), 012006. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/926/1/012006>
- Pangaliyev, Y., Akbayeva, L., Mamytova, N., Shamshedenova, S., Onerkhan, G., & Mkilima, T. (2024). Assessment of Water Regime, Management and Quality Analysis Based on Water Quality Indices – A Case of Karaganda Region, Kazakhstan. *Polish Journal of Environmental Studies*, 33(1), 781–801. <https://doi.org/10.15244/pjoes/171573>
- Permatasari, A., & Walinegoro, B. G. (2023). Collaborative Governance in Realizing Smart Society as a Sustainable Stunting Reduction Effort in Sleman Regency. *E3S Web of Conferences*, 440, 01010. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202344001010>
- Pramestya, E. A., & Wibawani, S. (2021). COLLABORATIVE GOVERNANCE IN THE MANAGEMENT OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISES (BUM DESA): CASE STUDY OF THE BUM DESA “SEWU BAROKAH” IN PENATARSEWU VILLAGE. *dia*, 19(1), 262–274. <https://doi.org/10.30996/dia.v19i1.5188>
- Pramodia Ahsan, R. D., Mulyani, S., Wulandari, C., & Ayu Saputri, L. B. (2022). Collaborative Governance Model During COVID-19: Towards Sustainable Tourism in Yogyakarta. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i9.10977>
- Rădulescu, M. A., Leendertse, W., & Arts, J. (2023). How Can Co-Creation Support Capacity Building for Adaptive Spatial Planning? Exploring Evidence from a Co-Creative Planning Process in The Netherlands. *Planning Theory & Practice*, 24(5), 639–662. <https://doi.org/10.1080/14649357.2023.2288203>
- Ramdani, R., & Mustalahti, I. (2023). Collaborative everyday adaptation to deal with peatland fires: A case study on the east coast of Sumatra, Indonesia. *Ecology and Society*, 28(3), art12. <https://doi.org/10.5751/ES-14263-280312>
- Rye, T., & Isaksson, K. (2018). Workshop 4 report: Criteria for successful collaboration. *Research in Transportation Economics*, 69, 344–348. <https://doi.org/10.1016/j.retrec.2018.08.004>
- Salsabila, L., Teovani Lodan, K., & Khairina, E. (2023). Public Engagement Impact on Sustainable Waste Management in Indonesia: Examining Public Behavior. *Jurnal Administrasi Publik Public Administration Journal*, 13(2), 158–178. <https://doi.org/10.31289/jap.v13i2.10391>
- Saptana, Sativa, M., & Ar-Rozy, A. M. (2023). Transformation of the Governance of the Farmer Groups Association towards Farmer Corporation in The Shalot Area

- of Solok Regency, Indonesia. *E3S Web of Conferences*, 444, 02016. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202344402016>
- Simarmata, M. J. S., Rizaldy, F. R., Sihombing, L. Y. L., & Amiruddin, M. (2024). Strategi Lobi dan Negosiasi dalam Penyelesaian Konflik Sosial: Studi Kasus Penolakan Pembangunan Gereja HKBP di Cilegon, Indonesia. *Indonesian Culture and Religion Issues*, 1(2), 12. <https://doi.org/10.47134/diksima.v1i2.18>
- Sobri, K. M. (2017). The Integration of Good Governance in Effectiveness of Regional Autonomy Implementation. *American Journal of Applied Sciences*, 14(1), 90–97. <https://doi.org/10.3844/ajassp.2017.90.97>
- Suyeno, S., Sumartono, S., Haryono, B. S., & Amin, F. (2024). Collaborative water governance model for potable urban water supply in Riau Province, Indonesia. *Water Policy*, 26(11), 1103–1120. <https://doi.org/10.2166/wp.2024.110>
- Van Vu, N., Nazari, M. A., Dang, T., Muralev, Y., Mohanraj, M., Tran, T., & Hoang, A. (2025). *Type of the Paper: Article*. SSRN. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5384374>
- Wiharja, P., Supriyono, B., Said, A., & Hermawan. (2024a). Collaboration Among Stakeholders in Efforts to Control Peatland Ecosystem Damage to Support Sustainable Development Goals (SDGS). *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(7), e06999. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n7-117>
- Wiharja, P., Supriyono, B., Said, A., & Hermawan. (2024b). Collaboration Among Stakeholders in Efforts to Control Peatland Ecosystem Damage to Support Sustainable Development Goals (SDGS). *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(7), e06999. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n7-117>
- Wilson, C., Claussen, C., & Valverde, P. (2021). Does civil society matter for natural resource governance? A comparative analysis of multi-stakeholder participation and EITI validation outcomes. *Resources Policy*, 72, 102084. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2021.102084>
- Zia Ud Din, M., Yuan Yuan, X., Khan, N. U., & Han, H. (2023). Linking local collaborative governance and public service delivery: Mediating role of institutional capacity building. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1), 906. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02421-3>